

BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab III ini, penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Semarang mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang.

Penulis telah melakukan wawancara yang sesuai dengan pedoman kepada narasumber yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Melalui wawancara tersebut telah diperoleh data berupa kata-kata atau cerita yang akan dianalisa untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam implementasi kebijakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam menyajikan data dengan menggunakan data dari informan. Setelah penyajian wawancara, peneliti akan mengelola dan menganalisis data dari hasil informasi yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

3.1 Profil Informan

Dalam penelitian ini penulis memilih informan yang mengetahui bagaimana upaya penanggulangan bencana di Kota Semarang, yaitu dari pihak Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (DINSOSPORA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan masyarakat

Tabel 3.1
Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Dra. Elis Simanjuntak	Kepala Seksi Kesetiakawanan Sosial DINSOSPORA Kota Semarang
2.	Mukson Soni	Ketua TAGANA Kota Semarang
3.	Ir. Suhardjono, M.Eng	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang
4.	Bambang Rudi Hartanto, SH, MM	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Semarang
5.	Drs. Abel M Monteiro, FGz	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Semarang
7.	Sri Lestari	Masyarakat

3.2 Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

Tahap implementasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Tahap ini adalah tahapan untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada pada tahap implementasi akan menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Sehingga suatu kebijakan yang baik apabila manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan, yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberika perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Berlakunya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana sebagai acuan bagi TAGANA Kota Semarang dalam mewujudkan penanggulangan bencana bidang sosial berbasis masyarakat. Untuk melihat pencapaian keberhasilan pelaksanaannya, dapat dilihat dari terlaksananya beberapa indikator, diantaranya yaitu Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Pasca Bencana.

3.2.1 Pra Bencana

Pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana. Pelaksanaan ini meliputi pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

a. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana. Kemudian yang dimaksud dengan pemetaan daerah rawan bencana

bermaksud untuk menentukan lokasi daerah rawan bencana yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penanggulangan bencana. Pemetaan ini juga berguna untuk mengantisipasi dan evakuasi bila bencana datang. Kemudian sasarannya adalah tersedianya peta lokasi daerah rawan bencana yang akan membantu pengambil keputusan untuk bertindak dalam masa sebelum bencana, antara lain terkait dengan kajian lokasi rawan bencana, mitigasi berbagai risiko bencana, dan proses evakuasi.

Istilah yang terkait dengan indikator ini adalah bencana, kerawanan, dan risiko. Bencana adalah suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada manusia, jasa, dan lingkungan. Kerawanan adalah tingkat kemungkinan suatu objek bencana yang terdiri dari masyarakat, struktur, pelayanan, atau daerah geografis mengalami gangguan akibat dampak bencana. Sedangkan risiko adalah perkiraan kerugian ataupun kehilangan akibat suatu bencana terhadap elemen yang menghadapi risiko dalam suatu periode waktu tertentu

Oleh sebab itu, pemetaan daerah rawan bencana diperlukan untuk mendeteksi daerah yang mempunyai potensi bencana, hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pemetaan kita meliputi wilayah per kelurahan ataupun wilayah RT/RW di kelurahan setempat yang rawan bencana, contohnya rawan rob atau air pasang kemudian ada daerah yang rawan banjir pada waktu musim penghujan.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Pemetaan yang dilakukan berdasarkan informasi dari informan adalah meliputi wilayah per kelurahan. Pemetaan yang dilakukan tersebut berguna untuk mengantisipasi dan melakukan evakuasi apabila bencana datang.

Pemetaan daerah rawan bencana yang dilakukan oleh pemerintah menjadi penting dalam rangka memberikan sebuah peringatan dini kepada masyarakat mengenai lokasi-lokasi yang dianggap beresiko tinggi terhadap bencana dan lokasi-lokasi yang aman dari bencana. Pemetaan daerah rawan bencana yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini DINSOSPORA yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak provinsi dan pihak-pihak terkait. Kerjasama ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, yaitu terwujudnya peta daerah rawan bencana. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk kita melaksanakan pendataan dan pemetaan itu kan kerjasama dengan provinsi, provinsi itu mereka punya dana dan sedangkan kota kan terbatas dananya. Sehingga tim yang mereka bentuk itu sebetulnya memang orang-orang Kota Semarang dan dari unsur TAGANA. Mereka harus terjun langsung ke tempat yang sering terjadi bencana seperti longsor dan banjir di Kota Semarang.”

(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

Pelaksanaan pemetaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak provinsi dan pihak-pihak terkait agar masyarakat mengetahui daerah-daerah mana saja yang masuk kategori rawan bencana. Pelaksana kebijakan pun harus terjun langsung untuk melakukan pendataan agar data yang didapat akurat.

Pemetaan dilakukan sebagai bahan untuk menentukan langkah terbaik yang harus ditempuh dalam mengantisipasi bencana sejak dini, sehingga nantinya dampak bencana itu bisa dikurangi . Sebagai upaya antisipasi datangnya bencana dan melakukan penanganan secara dini dengan cepat, BPBD dalam kesempatan lain menggambarkan pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana. Berikut hasil wawancaranya:

“Sebelum membuat pemetaan rawan bencana, harus ada kajiannya dulu harus ada studi-studi di lapangan dan ada yang diwawancara. Itu kita melakukan pendataan sambil kita melakukan studi pemetaan daerah rawan bencana. Tapi kita tidak melakukan pemetaan daerah rawan bencana, kita lebih tinggi dari rawan yaitu kita ke peta resiko bencana. Dari hasil studi dan hasil kajian itu kemudian dipetakan ke dalam peta risiko bencana. Risiko bencana ini memiliki rumus. Rumusnya adalah bahaya dikali kerentanan dan dibagi kapasitas. Nah berarti itu ada tiga variabel yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari situ baru bisa diketahui tentang resiko bencana.”
(Wawancara Ir. Suhardjono, M.Eng. Hari Senin, 5 September 2016)

Dalam melakukan pemetaan daerah rawan bencana, langkah awal yang dilakukan adalah terlebih dahulu dengan melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung risiko bencana (*risk*) sebuah daerah adalah dengan mengetahui bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*).

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas terkait pemetaan daerah rawan bencana, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, karena pemerintah telah memberikan pelayanan dengan melakukan pendataan secara langsung ke tempat-tempat lingkungan masyarakat dan menjalin kordinasi dengan pihak-pihak terkait.

b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Selain pemetaan daerah rawan bencana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat, indikator lainnya yang menjadi tugas dari pemerintah dalam penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana adalah upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Yang dimaksud peningkatan kapasitas masyarakat adalah sebuah proses dimana masyarakat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun

kelembagaannya agar dapat menjadi subjek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar lain dalam pembangunan itu sendiri.

Dewasa ini upaya peningkatan kapasitas merupakan bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari peningkatan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal.

Masyarakat diajak untuk melakukan kajian bencana, membuat perencanaan pengelolaan bencana, dan melaksanakannya dengan baik. Berikut hasil wawancaranya:

“Peningkatan kapasitas masyarakat yaitu kesadaran untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat, contohnya tidak membuang sampah di selokan, tidak membuang sampah di sungai. Kemudian membersihkan sampah atau kotoran dengan rutin dengan cara kerja bakti atau bakti sosial dalam masyarakat.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Peningkatan kapasitas masyarakat yang dimaksudkan untuk bersiaga dalam mencegah dan mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi di lingkungan terdekatnya adalah dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat dan melakukan kerja bakti rutin di lingkungan masyarakat. Peningkatan masyarakat tersebut merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan bencana yang dilakukan di lokasi rawan bencana

Upaya lainnya dalam peningkatan kapasitas masyarakat adalah dengan rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi adalah suatu proses perencanaan kedepan pada keadaan situasi yang tidak menentu dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan manajerial dan teknis, dan mengatur rancangan

sistem penanggulangan untuk mencegah maupu menanggapi keadaan darurat.

Berikut hasil wawancaranya:

“Membuat rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi itu adalah rencana persiapan ketika pada sebelum saat darurat. Rencana kontinjensi bisa terjadi bisa tidak. Bisa terjadi bisa tidak, bisa tidak kalau tidak ada bencana, bisa dilaksanakan kalau ada bencana.”

(Wawancara Ir. Suhardjono, M.Eng. Hari Senin, 5 September 2016)

Perencanaan kontinjensi dilakukan ketika terdapat potensi untuk terjadinya bencana. Cakupan kegiatan spesifik dimana menitik beratkan pada kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat. Pelaku yang terlibat hanya terbatas, sesuai dengan jenis ancaman bencananya.

Masyarakat adalah sebagai sasaran dari upaya peningkatan kapasitas ini, mengingat masyarakat sebagai pihak yang secara langsung terkena dampak apabila terjadinya bencana. Berikut hasil wawancaranya:

“Diadakannya sosialisasi untuk penghijauan itu yang pertama. Lalu perbaikan talud yang kedua. Untuk yang mengadakan kebanyakan dari kelurahan.”

(Wawancara Sri Lestari. Hari Senin, 5 September 2016)

Informan yang berada di Trangkil, Gunung Pati ini mengadakan bahwa beliau turut merasakan upaya dari peningkatan kapasitas masyarakat. Yang pertama adalah sosialisasi mengenai penghijauan. Sosialisasi ini bergunamengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon, dan melakukan penanaman kembali. Sedangkan yang kedua adalah perbaikan talud. Dengan adanya perbaikan talud, ini berguna untuk mengurangi terjadinya longsor di sekitar aliran sungai dan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas terkait peningkatan kapasitas masyarakat, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, karena pemerintah telah mengajak masyarakat diajak untuk melakukan kajian bencana, membuat perencanaan pengelolaan bencana, dan melaksanakannya. Kemudian masyarakat itu sendiri telah memberikan pelayanan dengan melakukan mencegah dan mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi di lingkungan terdekatnya adalah dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat dan melakukan kerja bakti rutin di lingkungan masyarakat.

c. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktik untuk mengurangi risiko-risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadinya bencana, yang meliputi pengenalan dan pemantuan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, dan peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari kerugian tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“Jadi kita memberitahu mereka bahwa itu sebenarnya ada usaha dari pemerintah untuk mengurangi risiko itu dengan satu dengan sosialisasi.”
(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

Upaya antisipatif untuk mengurangi ataupun meminimalkan dampak dari kerugian adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, masyarakat harus melakukan pembersihan di lingkungannya. Jika lingkungan tidak terawat, bencana akan mudah terjadi. Banjir, rob, dan tanah longsor menjadi salah satu bencana yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sampah-sampah yang menumpuk tidak pada tempatnya akan memicu bencana alam seperti banjir, rob, dan tanah longsor. Walaupun beberapa kali sering terjadi, namun masyarakat yang tidak juga mengubah kebiasannya, tidak dapat menghindar dari bencana ini.

TAGANA dalam kesempatan lain menjabarkan pengurangan risiko bencana dalam suatu penjabaran yang lebih luas, dimana pengurangan risiko bencana tersebut dengan penanaman mangrove, meningkatkan swadaya masyarakat, dan pembuatan tanggul-tanggul. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk kegiatan pengurangan risiko bencana, satu yaitu daerah rawan rob kita mengadakan penanaman mangrove untuk mengurangi risiko rob yang sudah tinggi. Kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat dalam tanggap darurat jika terjadi bahaya rob maupun banjir. Jadi kesadaran secara tanggap darurat itu upayanya. Kemudian ada lagi persiapan dalam mengantisipasi banjir yaitu mempersiapkan karung berisi tanah untuk membuat tanggul-tanggul yang rawan rob maupun banjir.”
(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Untuk kegiatannya tersebut, yang pertama adalah penanaman mangrove untuk mengurangi risiko rob. Mangrove ini meskipun tidak selebat dan sebesar hutan lindung, namun memiliki banyak fungsi untuk menjaga daratan dari pasang surut air laut. Kedua adalah meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat

dalam tanggap darurat jika terjadi bahaya rob maupun banjir, yaitu dengan meningkatkan kesadaran secara tanggap darurat. Ketiga adalah mempersiapkan karung berisi tanah untuk membuat tanggul-tanggul yang rawan rob maupun banjir. Tujuan dari pembuatan tanggul buatan ini adalah untuk mencegah banjir maupun rob di dataran yang di lindunginya.

Upaya pengurangan risiko merupakan bentuk upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, peningkatan SDM, sosialisasi, dan peningkatan kelembagaan.

Berikut hasil wawancaranya:

“Berarti yang harus dikurangi adalah kerentanannya. Kemudian kapasitasnya ditingkatkan. Kerentanan itu dikurangi artinya bahayanya kalau bisa dikurangi contohnya bahaya banjir. Berarti harus ada suatu kajian atau realisasi, bisa bisa fisik maupun non fisik ya. Kemudian dari pengurangan nilai bahayanya, berarti harus ada pendataan tentang penduduk-penduduk yang rentan, penduduk yang bayi, cacat, usia manula, ibu hamil, dan lain-lain itu harus ada pendataannya. Sehingga itulah yang harus diperhatikan. Untuk meningkatkan kapasitas lewat peningkatan SDM, sosialisasi, dan peningkatan kelembagaan.”

(Wawancara Ir. Suhardjono, M.Eng. Hari Senin, 5 September 2016)

Dalam melakukan pengurangan risiko bencana, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung risiko bencana sebuah daerah adalah dengan mengetahui bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*).

Bahaya (*hazard*) adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap

sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Kerentanan (*vulnerability*) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (bahaya alam atau bahaya non-alam) yang terjadi akan menimbulkan bencana atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, persiapan, dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Kapasitas (*capacity*) adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, dan lainnya). Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun temurun. Risiko bencana (*risk*) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa luka, jiwa terancam, kematian, kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko ini merupakan kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Meskipun pada umumnya bencana tidak mungkin dicegah, akan tetapi lebih baik apabila dilakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana. Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana dilakukan baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Sehingga dapat dapat meminimalisir apabila terjadinya bencana.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya terkait pengurangan risiko bencana yakni dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, kemudian penanaman mangrove, meningkatkan swadaya masyarakat, dan pembuatan tanggul-tanggul, namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti di

lapangan, sampah-sampah masih banyak yang menumpuk tidak pada tempatnya. Hal tersebut akan memicu bencana alam seperti banjir, rob, dan tanah longsor. Walaupun beberapa kali sering terjadi, namun masyarakat yang tidak juga mengubah kebiasannya, tidak dapat menghindar dari bencana ini. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan pengurangan risiko bencana belum berjalan dengan baik.

d. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat

Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kesiapsiagaan akan membawa masyarakat di daerah rawan bencana pada tataran kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi efektif.

Membangun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut mental dan budaya serta disiplin ditengah masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana. Berikut hasil wawancaranya:

“Ya ini tadi kita melatih mereka dan memberikan bimbingan tentang cara mengatasi bencana, yang simpel aja nggak usah yang susah-susah itu biasanya mereka sudah dilatih untuk cara mengevakuasi.”
(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

“Lewat sosialisasi, pelatihan, dan melakukan simulasi.”
(Wawancara Ir. Suhardjono, M.Eng. Hari Senin, 5 September 2016)

Kesiapsiagaan juga perlu adanya peningkatan dalam upaya menghadapi kemungkinan terjadi bencana, misalnya dengan pelatihan upaya cara evakuasi. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan orang-orang dengan cepat dari ancaman atau kejadian bahaya bencana ke tempat aman dan jauh dari zona berbahaya dengan tujuan agar korban tidak terkena efek dari bencana tersebut. Oleh karena itu, pelatihan evakuasi berguna untuk meminimalkan korban bencana.

Kemudian langkah melakukan koordinasi dilakukan untuk menjalin kerja sama terkait dengan bencana. Langkah ini merupakan suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah tepat, waktu, dan mengarahkan pelaksanaan yang harmonis. Berikut hasil wawancaranya:

“Masyarakat mengadakan koordinasi dengan instansi terkait antara masyarakat dengan kelurahan kemudian dengan DINSOSPORA maupun BPBD atau instansi relawan-relawan bencana yaang saling bekerjasama dengan cara pelatihan bersama dan tukar ilmu tentang kesiapsiagaan bencana.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Upaya masyarakat dalam mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait adalah dengan mengadakan pelatihan bersama dan saling tukar ilmu mengenai kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan berupa pelatihan bersama dan saling tukar ilmu mengenai kesiapsiagaan bencana agar masyarakat semakin cerdas dalam menanggulangi bencana, siaga terhadap bencana, dan memberikan kesadaran agar lebih mencintai lingkungan

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, kesiapsiagaan yang dilakukan ini lebih ditekankan adalah melatih

dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat siap apabila terjadinya bencana.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas terkait peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dapat disimpulkan telah berjalan dengan baik, karena telah dilakukannya pelatihan upaya cara evakuasi, melakukan koordinasi untuk menjalin kerja sama terkait dengan bencana, mengadakan pelatihan bersama dan saling tukar ilmu mengenai kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan berupa pelatihan bersama dan saling tukar ilmu mengenai kesiapsiagaan bencana agar masyarakat semakin cerdas dalam menanggulangi bencana, siaga terhadap bencana, dan memberikan kesadaran agar lebih mencintai lingkungan.

e. Peringatan Dini

Pada saat menjelang kejadian bencana itu terjadi, masyarakat tidak mengetahui informasi tentang kemungkinan terjadinya bencana, baik melalui media massa maupun pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab. Di sisi lain, seandainya pun ada informasi peringatan dini, informasi tersebut tidak dapat menjangkau ke seluruh masyarakat atau daerah yang lokasinya sulit dijangkau. Bisa juga terjadi sistem peringatan dini yang cukup bagus, sarananya cukup lengkap, akan tetapi saat diperlukan tidak berfungsi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan masyarakat untuk menyelamatkan diri. Sistem peringatan dini yang berbasis teknologi tinggi memang tidak mutlak menjamin maupun menyelesaikan masalah. Dalam kondisi ini kearifan lokal diperhitungkan.

Peringatan dini dimaksudkan sebagai serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan sistematis serta diseminasi informasi tentang keberadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi tanggap, dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan terjadinya bencana. Tujuan dari peringatan dini adalah menurunkan kualitas dan kuantitas jumlah korban bencana (apabila bencana itu terjadi). Dalam pemberian peringatan dini, harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, dan bersifat resmi.

Peringatan dini dilakukan melalui kegiatan pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan tindakan oleh masyarakat.

Terkait dengan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi peringatan dini sebelum terjadinya bencana, upaya Pemerintah Kota Semarang adalah mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana dan mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Atas bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, adanya sistem deteksi dini merupakan hal yang perlu dilakukan.

BPBD memiliki sistem yang dinamakan *Early Warning System*. *Early Warning System* adalah sebuah tatanan penyampaian informasi hasil prediksi terhadap sebuah ancaman kepada masyarakat sebelum terjadinya sebuah bencana yang dapat menimbulkan risiko. Memiliki tujuan untuk memberikan peringatan agar penerima informasi dapat segera siap siaga dan bertindak sesuai kondisi,

situasi dan waktu yang tepat. *Early Warning System* berpegang pada prinsip utama yaitu memberika informasi cepat, akurat, tepat, mudah diterima, terpecaya, dan berkelanjutan. Berikut hasil wawancaranya:

“Yang baru kita punya adalah *Early Warning System* untuk banjir. Nah saat ini yang baru terinstall baru satu. Nah sayangnya operator untuk *Early Warning System* itu ada di Dinas PSDA. Nah harusnya yang paling betul kalau kita punya operatornya ada disini, sehingga kita mendapatkan informasi banjir bisa lebih cepat. Sehingga kita menyampaikan ke masyarakat yang rawan bencana maupun masyarakat di luar itu bisa kita sampaikan lewat posko yang 24 jam. Yang tanah longsor kita belum. Tapi bukan berarti kita tidak akan pasang. Nanti kita akan kaji dulu.”

(Wawancara Ir. Suhardjono, M.Eng. Hari Senin, 5 September 2016)

Berdasarkan informasi diatas diketahui bahwa BPBD sudah memiliki alat yang bernama *Early Warning System* sebagai upaya dalam pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya bencana. Akan tetapi hal ini masih belum mencapai maksimal karena pengelolaan *Early Warning System* dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA), sehingga BPBD tidak begitu cepat dalam mendapatkan informasi apabila deteksi tersebut memberi sinyal peringatan. Kemudian juga belum adanya sistem deteksi untuk mengantisipasi bencana longsor.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas terkait peringatan dini, dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Meskipun pemerintah telah memiliki sebuah sistem bernama *Early Warning System* sebagai upaya dalam pendeteksian dini atas kemungkinan terjadinya bencana. Namun pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA), sehingga BPBD sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di Kota Semarang tidak begitu cepat dalam mendapatkan informasi apabila deteksi tersebut memberi

sinyal peringatan. Kemudian baru adanya satu sistem deteksi dini yaitu untuk antisipasi rob.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahapan pra bencana, diketahui bahwa bencana alam tidak mungkin untuk dihindarkan, tetapi akan lebih baik apabila terdapat usaha-usaha pencegahan atau pengurangan bencana alam. Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko pada pra bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bahaya bencana.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan berbagai upaya tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya berhasil karena pada faktanya masih terdapat masyarakat yang masih belum bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Sehingga bencana seperti rob maupun banjir bisa sewaktu-waktu terjadi. Kemudian belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapat kendala-kendala di lapangan yang dihadapi yaitu dengan ditujukannya adanya perbedaan pernyataan diantara informan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang pada pra bencana belum dapat berjalan dengan baik.

3.2.2 Tanggap Darurat Bencana

Pada penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi sistem kaji cepat, pendataan korban bencana, evakuasi ke penampungan sementara, dapur umum, dan pemberian logistik.

a. Sistem Kaji Cepat

Pelaksanaan pada tahapan tanggap darurat bencana dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan kaji cepat. Sistem kaji cepat adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam memberika respon bencana dengan cepat dan tepat.

Dengan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Kemudian melaporkan hasil identifikasi dan memberikan rekomendasi kepada instansi sosial serta melakukan koordinasi.

Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk proses mengkaji dengan cepat dengan cara satu yaitu mendatangi tempat lokasi bencana contohnya lokasi bencana banjir maupun bencana akibat rob maupun bencana yang lainnya tanah longsor dengan mendata tempat kejadian kemudian akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut bisa jumlah korban maupun pengungsi yang ada di bencana terjadi. Kemudian setelah mendata kita nanti ke dinas sosial atau instansi lain untuk melaporkan kejadian bencana dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait supaya nanti bisa ditangani dengan cepat dan tepat.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Proses mengkaji yang dilakukan adalah mendatangi lokasi bencana dengan mendata tempat kejadian dan mendat kerugian yang didapatkan oleh bencana tersebut. Kemudian setelah itu, melaporkan ke dinas sosial maupun instansi lain. Setelah itu, melakukan penkoordinasian dengan instansi-instansi terkait guna memperoleh penanganan yang cepat dan tepat.

Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk melapor apabila terjadinya bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) juga dikerahkan untuk melakukan pertolongan di lapangan. TRC adalah tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana berupa menganalisa

berbagai situasi di daerah bencana serta untuk memperoleh informasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

Berikut hasil wawancaranya:

“Saat ada bencana, itu masyarakat melapor ataupun kita memantau. Kalau ada bencana tolong dilaporkan dan mereka sudah kita bekal juga keterampilan tentang kebencanaan. Begitu kita mendengar atau kita dapat laporan, Tim Reaksi Cepat atau TRC kita yang ada di posko akan meluncur ke kejadian. Disitu yang pertama kali yaitu memberikan pertolongan pertama, kalau itu kebakaran dan kita membantu memadamkan api atau penyelamatan terhadap korban. Kalau banjir, kita evakuasi gitu.”

(Wawancara Bambang Rudi Hartanto, SH, MM. Hari Senin, 30 Agustus 2016)

Ketika bencana datang, selain pemerintah bertugas memantau, masyarakat juga mempunyai kewajiban apabila terjadi bencana. TRC pun dikerahkan sebagai penggerak awal kejadian bencana dan mendukung kegiatan operasional bencana. Tugas pertama yang TRC lakukan adalah penyelamatan terhadap korban apabila bencana datang.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses mengkaji dengan cepat dengan melaporkan hasil identifikasi dan memberikan sebuah rekomendasi kepada instansi terkait memerlukan adanya koordinasi yang baik. Untuk proses mengkaji dengan cepat yaitu mendatangi tempat lokasi bencana. Kemudian setelah mendatanya lalu ke dinas sosial atau instansi sosial untuk melaporkan kejadian bencana dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait supaya nanti bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem kaji cepat telah berjalan dengan baik.

b. Pendataan Korban Bencana

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pada pelaksanaan tahapan tanggap darurat bencana dalam penanggulangan bencana yaitu dengan pendataan korban bencana. Bencana yang menimpa di Kota Semarang tidak menutup kemungkinan akan membawa akibat jatuhnya korban. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendataan korban secara cepat dan akurat. Metode yang digunakan adalah dengan proaktif terjun ke lapangan sehingga data korban lebih akurat dan memungkinkan penyusunan peta lebih cepat dalam distribusi korban.

Berkaitan dengan upaya dalam mendata korban bencana, Pemerintah Kota Semarang selalu melakukannya dengan mendatangi langsung ke lokasi kejadian kemudian mendatanya dan melaporkannya. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk upaya dalam mengidentifikasi korban bencana Tim TAGANA nanti mendatangi lokasi di RT/ RW maupun kelurahan setempat kemudian mendata jumlah korban baik yang balita kemudian anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Kemudian jumlah korban yang diderita baik manusia maupun materiil yang ada di lokasi bencana kemudian kita mendata dengan cara seksama, kita tulis kemudian kita laporkan ke dinas terkait dengan DINSOSPORA Kota Semarang.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Upaya yang dilakukan dalam mendata korban bencana adalah proaktif dengan terjun ke lapangan. Kemudian melaporkannya ke dinas terkait dengan bekerja sama dengan DINSOSPORA.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pendataan korban bencana dilakukan dengan proaktif terjun ke lapangan sehingga

data korban lebih akurat. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan pendataan korban bencana telah berjalan dengan baik.

c. Evakuasi ke Penampungan Sementara

Penampungan sementara dilakukan pada tempat seperti bangunan gedung yang aman, sekolah, kantor, stadion, atau gudang. Jika tidak memungkinkan, dapat ditempatkan di lapangan atau tempat terbuka, dengan mendirikan tenda-tenda. Untuk pengungsian yang cukup lama, dibuat hunian semi permanen berupa barak yang berisi beberapa keluarga sambil menunggu tindakan berikutnya.

Penampungan sementara bisa memanfaatkan fasilitas dan sarana yang tersedia seperti tenda, barak, atau kombinasi keduanya. Hal ini ditujukan untuk tetap terjaganya hunian darurat yang layak, agar terhindar dari menurunnya standar kehidupan minimal.

Pada penampungan sementara, pengungsi tidak dibiarkan hanya sekedar ditampung untuk menghindari jatuhnya korban, mereka harus diperlakukan sebagaimana orang lain yang tidak menjadi korban. Hal tersebut dapat mengurangi stres, ketegangan, dan kondisi negatif lainnya. Selain itu pula dapat dijadikan sarana untuk saling berinteraksi antar sesama pengungsi.

Bencana sewaktu-waktu bisa saja terjadi, pelaksanaan evakuasi korban bencana dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman merupakan bentuk upaya yang dilakukan. Dimana pada sebelumnya telah disepakati tempat-tempat yang akan dijadikan sebagai tempat yang lebih aman. Berikut hasil wawancara yang didapat:

“Untuk operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban, kita bawa ke tempat aman contohnya kita bawa nanti ke balai desa. Kalau terjadi banjir

ya diletakkan ke yang lebih tinggi atau dirumah penduduk yang posisinya lebih tinggi pada banjir maupun rob. Kemudian di tempat-tempat masjid, biasanya lebih tinggi dari rumah-rumah masyarakat. Jadi kita cari alternatif yang terbaik supaya nanti beban yang terkena musibah bisa diselamatkan dengan cepat.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Penanganan dalam operasi tanggap darurat yang dilakukan adalah membawa korban ke tempat aman, seperti balai desa, masjid, ataupun rumah-rumah masyarakat yang layak untuk ditempati. Penanganannya pun harus cepat dan tepat agar beban korban menjadi ringan.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya evakuasi perlu adanya kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaannya. Evakuasi tersebut bisa dilakukan dengan upaya menyelamatkan korban bencana dari tempat tidak aman ke tempat yang aman. Dimana pihak-pihak terkait telah memastikan lokasi mana yang akan dijadikan tempat penampungan sementara untuk kegiatan evakuasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa evakuasi ke penampungan sementara telah berjalan dengan baik.

d. Dapur Umum

Dapur umum adalah dapur lapangan yang diselenggarakan untuk menyediakan makanan dan dapat didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu cepat dan tepat.

Dalam rangka untuk meringankan penderitaan para korban bencana, Pemerintah Kota Semarang mempunyai tugas yaitu adalah memberikan bantuan makanan kepada para korban. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk

mempelancar pemenuhan kebutuhan makanan bagi korban bencana perlu diselenggarakan dapur umum. Berikut hasil wawancaranya:

“Pada bidang dapur umum kita nanti bekerjasama dengan masyarakat setempat yang terkena musibah dibantu dengan TAGANA, DINSOSPORA dan Dinas Sosial Jawa Tengah, untuk nanti mengecek kalau nanti ada pengungsi, banyak nanti kita membuka dapur umum. Nanti kalau hanya ada beberapa keluarga saja, otomatis nanti kita bisa serahkan kepada masyarakat setempat untuk selalu meringankan beban mereka. Kalau pengungsinya banyak, nanti kita mengajukan data kemudian kita sampaikan kepada DINSOSPORA dan Dinas Sosial Provinsi. Kalau dimungkinkan membuka dapur umum, kita siap membuka antara masyarakat, TAGANA, DINSOSPORA dan dibantu dengan Dinas Sosial Provinsi.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Penyelenggaraan dapur umum dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Langkah awal adalah mengecek terlebih dahulu ke lapangan. Apabila hanya beberapa korban saja, maka akan diserahkan kepada masyarakat sekitar untuk menanganinya. Namun apabila terdapat korban dalam jumlah banyak, maka akan diselenggarakan dapur umum.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas, dapur umum diselenggarakan untuk menyediakan makanan dan kemudian didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu cepat dan tepat. Sebagaimana yang ada pada hasil wawancara, dapur umum akan terselenggara apabila terdapat banyaknya korban bencana. Apabila korban bencananya tidak sampai demikian, maka hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar terutama dari masyarakat yang tidak terkena bencana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dapur umum telah berjalan dengan baik.

e. Pemberian Logistik

Operasi tanggap darurat pada bidang logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari barang habis pakai, misalnya sembilan bahan pokok (sembako), obat-obatan, pakaian, air, dan lain sebagainya. Kegiatan logistik meliputi inventarisasi, pemenuhan kebutuhan, pengadaan, pergudangan, dan pemusnahan. Persediaan logistik yang paling tepat adalah yang bersumber dari lokal (daerah setempat dan sekitarnya). Untuk mobilisasi logistik diperlukan unsur transportasi. Untuk mengatasi kendala yang satu ini dirancang untuk mendekatkan semacam tempat penyimpanan logistik di sekitar lokasi bencana.

Pemerintah daerah sebagai pemegang dalam pengelolaan sumber daya di wilayahnya mempunyai kewajiban mengembangkan sistem logistik berbasis kewilayahan berdasarkan keunggulan potensi sumber daya yang dimiliki. Manajemen pengelolaan sistem logistik wilayah yang berbasis kewilayahan hendaknya terkoordinasi secara komprehensif integral, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, serta seluruh instansi yang terkait. Berikut hasil wawancaranya:

“Pelaksanaan operasional pada bidang logistik, kita memaksimalkan kemampuan yang ada di masyarakat kemudian dibantu dengan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota dengan cara saling mempersiapkan logistik yang dibutuhkan, contohnya kebutuhan untuk beras kemudian untuk sayur mayur, lauk pauk, obat-obatan dan perlengkapan darurat lainnya.”
(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Pelaksanaan operasi tanggap darurat pada bidang logistik ini melibatkan sistem kelembagaan antar instansi-instansi terkait. Selain itu juga dengan memaksimalkan kemampuan yang ada di masyarakat. Dengan melaksanakan

prosedur pelaksanaan logistik yang benar sesuai dengan ketentuan, harapannya adalah pelaksanaan logistik yang dibutuhkan korban bencana tidak mengalami kendala.

BPBD dalam kesempatan lain menggambarkan pelaksanaan operasi tanggap darurat pada bidang logistik dalam suatu contoh yaitu bencana berupa kebakaran.

Berikut hasil wawancaranya:

“Ini saya kasih contoh juga ya, kebakaran. Begitu kebakaran terjadi, TRC tadi turun ke lapangan. Begitu terdengar atau mendengar laporan tentang kebakaran, mobil yang meluncur ke lapangan itu mobil rescue. Isinya itu ada sembako, ada tikar, dan ada deklit. Nantinya untuk apa? Kalau nanti yang terbakar yang membutuhkan deklit, nanti kita kasih langsung. Kalau ternyata mereka membutuhkan tempat untuk memasak, saya ada sumbangan dari provinsi dari BNPB Pusat berupa seperangkat alat dapur.”

(Wawancara Bambang Rudi Hartanto, SH, MM. Hari Senin, 30 Agustus 2016)

BPBD dalam melaksanakan pelaksanaan logistik pada bencana kebakaran ini mengerahkan peran dari Tim Reaksi Cepat (TRC). TRC proaktif ke lapangan berdasarkan hasil laporan atau mengetahui sendiri bencana tersebut. Kemudian berangkat ke lokasi bencana dengan menggunakan mobil *rescue* yang berisikan alat masak, sembako, tikar, dan deklit.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas, pemberian logistik digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari barang habis pakai. Pelaksanaan ini melibatkan sistem kelembagaan antar instansi-instansi terkait. Selain itu juga dengan memaksimalkan kemampuan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian logistik telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggap darurat bencana, diketahui bahwa bencana bisa sewaktu-waktu terjadi. Oleh karena itu, sikap siap pada saat tanggap darurat bencana. Penggunaan alat komunikasi seperti *handy talk* ataupun *handphone*, memudahkan Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Kemudian juga alat komunikasi dapat dilakukan sewaktu masyarakat ingin melaporkan kejadian suatu bencana di daerahnya.

Dengan bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, pemerintah pun sigap untuk mengatasinya, misalnya adalah dengan telah adanya shelter-shelter, posko-posko, ataupun tempat-tempat aman lainnya dalam upaya mengevakuasi korban bencana.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang pada tanggap darurat bencana sudah dapat berjalan dengan baik.

3.2.3 Pasca Bencana

Pelaksanaan pada penanggulangan bencana pada pasca bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat setelah kejadian bencana yang meliputi pendataan kerugian material, pendataan kerusakan tempat tinggal, penanganan psikososial, dan pemulihan sosial. Memiliki tujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Kondisi pasca bencana adalah keadaan suatu wilayah dalam proses pemulihan setelah terjadinya bencana. Pada kondisi ini dipelajari langkah apa yang dilakukan dalam hal upaya untuk mengembalikan tatanan masyarakat seperti semua sebelum terjadinya bencana.

a. Pendataan Kerugian Material

Kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana membawa dampak yang tidak sedikit. Bukan hanya memakan korban jiwa, namun kerap membawa dampak kerugian materi.

Terkait dengan upaya mendata kerugian material pada korban bencana, upaya adalah dengan mendatangi langsung maupun secara tidak langsung ke korban bencana yang mengalami musibah. Berikut hasil wawancaranya:

“Upaya mendata kerugian material pada korban bencana bisa kita laksanakan dengan pendataan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung kita data di tempat terjadi bencana yaitu jumlah kerugian material baik rumah maupun tempat-tempat ibadah atau fasilitas umum lainnya kemudian pendataan korban bencana ada berapa orang baik korban untuk anak-anak kemudian dewasa baik wanita maupun pria kemudian lanjut usia dan lain-lain. Kemudian kerugian lain-lainnya berupa fasilitas-fasilitas pendukung di masyarakat itu bisa kita perkirakan dan kita taksir berapa kerugiannya kita identifikasi bersama-sama dan didata oleh TAGANA kemudian dilanjutkan oleh DINSOSPORA dan Dinas Sosial Provinsi.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Bencana yang datang akan membawa dampak, salah satunya adalah kerugian material. Dalam mendata kerugian material, yang dilakukan adalah mendatangi lokasi kejadian ataupun ke lokasi evakuasi untuk menemui korban untuk menanyakan dan mendata kerugian material apa saja yang dialaminya. Kemudian setelah itu, TAGANA melaporkan ke DINSOSPORA dan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi untuk segera diambil penanganan tindakan.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan, mengamati bahwa terdapat kerugian juga dialami pada kondisi jalan. Jalanan yang rusak akibat terkikis merupakan dampak dari banjir maupun rob yang terjadi. Terkait jalanan tersebut, pemerintah

nampaknya belum begitu sepenuhnya konsen terhadap hal itu. Jalanan yang rusak tentu akan cukup membahayakan, misalnya akan menimbulkan tersendatnya jalan dan terjadinya kecelakaan.

Selain itu pula dalam pendataan kerugian material juga mempersiapkan kapasitas kelembagaan dan membentuk SDM-SDM yang berfungsi sehingga pada tataran ketika terjadi tanggap darurat, mereka siap memainkan peranannya.

“Kita mempersiapkan kapasitas kelembagaan dan membentuk SDM-SDM yang berfungsi sehingga pada tataran ketika terjadi tanggap darurat kita memainkan peranannya.”

(Wawancara Drs. Abel M Monteiro, FGz. Hari Rabu, 31 Agustus 2016)

Upaya proaktif dilakukan untuk mempersiapkan kapasitas kelembagaan dan membentuk SDM-SDM. Sehingga akan ada hasil pada tataran ketika pendataan kerugian material yang dialami oleh korban bencana.

Berdasarkan hasil uraian wawancara, diketahui bahwa kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana membawa dampak yang tidak sedikit, seperti kerugian material. Menanggapi hal tersebut, pendataan terhadap kerugian material merupakan upaya tepat untuk menangani ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendataan kerugian material telah berjalan dengan baik.

b. Pendataan Kerusakan Tempat Tinggal

Kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana selain kerap membawa dampak kerugian materi, namun juga kerap membawa dampak terhadap kerusakan tempat tinggal. Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal.

Ketika terjadinya bencana maka ada kemungkinan terjadinya kerusakan tempat tinggal korban bencana. Oleh sebab itu perlu adanya upaya dalam mendata tempat tinggal korban bencana. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk mengidentifikasi dan mendata kerugian rumah atau tempat tinggal korban bencana, kita biasanya itu pendataan meliputi kerusakan rumah itu rumahnya rusak ringan, sedang dan parah. Jadi kita rata-rata ketiga itu yang sering kita gunakan. Untuk kerusakan ringan biasanya hanya sedikit yang rusak. Kemudian kerusakan sedang ya setengah rumah yang rusak. Untuk kerusakan parah misalkan rumah yang besar yang rumahnya roboh atau tinggal puing-puingnya saja.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Ketika terjadinya bencana, maka kemungkinannya adalah tempat tinggal dari korban bencana akan mengalami kerusakan. Kerusakan tempat tinggal yang ditimbulkan oleh bencana, memerlukan pendataan kerusakan tempat tinggal korban bencana. Pendataan tersebut diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu kerusakan ringan, sedang, dan parah.

Berdasarkan hasil uraian wawancara pada pendataan kerusakan tempat tinggal, diketahui bahwa kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana membawa dampak yang tidak sedikit, seperti kerugian terhadap tempat tinggal korban. Menanggapi hal tersebut, pendataan terhadap kerugian tempat tinggal merupakan upaya tepat untuk menangani ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendataan kerugian material telah berjalan dengan baik.

c. Penanganan Psikososial

Keadaan psikososial merupakan gambaran hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Terkait dengan kebencanaan,

keadaan psikososial korban bencana dari suasana gembira bisa berubah menjadi depresi, cemas, sedih, putus asa, dan lain sebagainya.

Perlu adanya penanganan psikososial dan juga rujukan kepada korban-korban bencana dengan menggunakan sumber daya dan kekuatan organisasi untuk proses pemulihan korban-korban dari masalah psikososial untuk membantu pemulihan psikologis individu sehingga dapat kembali menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Berikut hasil wawancaranya:

“TAGANA biasanya kan melihat keadaan umpamanya stres atau ada yang jadi sedih berkelanjutan atau putus asa, nanti kan akan dirujuk kemana gitu. Umpamanya ke psikolog atau kemana itu akan didampingi. Artinya kita memberikan pendampingan pada korban itu agar mereka bisa kembali seperti semula, tidak berlarut-larut menyesali kejadian apa yang mereka alami.”

(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

“Pelaksanaan dalam penanganan psikososial kita nanti mengadakan penyuluhan, hiburan dan penyegaran rohani maupun jasmani. Untuk rohani nanti kita datangkan ulama atau pastur atau rohaniawan untuk menguatkan keimanan. Kemudian sosial kita ikutkan dengan teman-teman dari Dinas Sosial, dari PMI maupun dari relawan-relawan yang bisa menjalankan penyegaran dari masyarakat yang terkena musibah supaya nanti bisa happy lagi atau senang kembali agar kesedihan yang berlarut-larut bisa dihilangkan. Kemudian untuk rujukan ini bisa kita tindaklanjuti kepada dinas-dinas terkait supaya nanti bisa mendukung untuk penyegaran psikososial kepada masyarakat yang terkena musibah bencana.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Upaya yang dilakukan dalam penanganan psikososial adalah melihat terlebih dahulu keadaan korban bencana. Kemudian setelah itu memberikan rujukan ke pihak-pihak yang tepat untuk menangani, misalnya adalah psikolog. Kegiatan penyuluhan, hiburan, dan pemberian penyegaran rohani dan jasmani

juga dilakukan dalam rangka masyarakat yang terkena dampak musibah bisa kembali dalam suasana normal dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan.

Berdasarkan penuturan beberapa informan tersebut, maka peneliti juga menanyakan kepada informan masyarakat mengenai pelaksanaan dalam penanganan psikososial. Berikut hasil wawancaranya:

“Kalau beban mental itu sampai sekarang masih trauma. Apalagi kalau hujan ya, kadang anak-anak yang masih inget. Dulu pernah diadakan konseling untuk menghilangkan trauma bagi anak-anak. Dulu pernah ada tapi sekarang gak berlanjut lagi karena sudah normal.”

(Wawancara Sri Lestari. Hari Senin, 5 September 2016)

Berdasarkan penuturan dari informan masyarakat, ibu Sri menuturkan bahwa beliau pernah mengalami musibah yaitu bencana longsor di Trangkil, Gunung Pati pada tahun 2013. Dimana pada saat itu rumah beliau rusak parah. Walaupun telah tiga tahun berlalu, beliau sampai saat ini masih mengalami trauma. Trauma tersebut nampak apabila terjadinya hujan. Beliau mengkhawatirkan akan terjadinya kembali bencana longsor tersebut.

Berdasarkan hasil uraian wawancara pada penanganan psikososial, diketahui bahwa keadaan psikososial korban bencana dari suasana gembira bisa berubah menjadi depresi, cemas, sedih, putus asa, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan dalam penanganan psikososial adalah melihat terlebih dahulu keadaan korban bencana. Kemudian setelah itu memberikan rujukan ke pihak-pihak yang tepat untuk menangani. Namun berdasarkan wawancara dengan ibu Sri, beliau mengkhawatirkan akan terjadinya kembali bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penanganan

psikososial belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak adanya penanganan psikososial yang berkelanjutan.

d. Pemulihan Sosial

Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya. Pemulihan ini terkait dengan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai dengan tingkat yang memadai. Sasarannya adalah normalisasi dan berfungsinya kembali secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Sudah terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan upaya pemulihan sosial korban bencana. Dimana berbagai upaya tersebut dilakukan tidak hanya oleh DINSOSPORA Kota Semarang saja, namun diperlukan kerjasama antar SKPD dalam memberikan pemulihan sosial korban bencana, sehingga komitmen semua pihak diperlukan dalam hal ini. Berikut hasil wawancaranya:

“Biasanya kan kita memberikan mereka pendampingan sesuai keadaannya. Jadi umpamanya orang yang butuh hiburan kan nanti kita hubungkan dengan pendidikan biar mereka mendatangkan guru-guru yang bisa memberikan pendekatan dari segi pendidikan untuk memberi semangat belajar mungkin karena di pengungsian kan belum bisa kembali belajar, nanti didatangkan gurunya. Kalau yang bermasalah dengan sosial, nanti kita dampingi untuk mengurangi stresnya dengan mendatangkan orang-orang seperti psikolog atau sejenisnya.”

(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

“Upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana ini, kita langsung kepada masyarakat yang terkena musibah. Jadi kita caranya biasanya dikumpulkan di Balai Desa nanti kita pilah-pilah untuk kelompok anak-anak, kemudian untuk kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu nanti kita kasih pencerahan baik rohani maupun jasmani. Kemudian upaya-upaya

motivasi atau penyegaran supaya nanti bersemangat lagi untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan Dinas Sosial kemudian Pemerintah Kota dan Kabupaten yang terkena musibah maupun instansi-instansi PMI, TNI dan POLRI.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Jumat, 29 Juli 2016)

Upaya pemulihan sosial korban bencana ini bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadinya bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis yang berlanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Kemudian kerjasama antar SKPD dalam memberikan pemulihan sosial korban bencana diperlukan untuk saling bersama-sama menangani hal ini.

Berdasarkan hasil uraian wawancara pada pemulihan sosial, diketahui bahwa sudah terdapat upaya pemulihan yang bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadinya bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis yang berlanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Kemudian kerjasama antar SKPD dalam memberikan pemulihan sosial korban bencana diperlukan untuk saling bersama-sama menangani hal ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemulihan sosial sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada pasca bencana, diketahui bahwa penanggulangan pada pasca bencana adalah upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar pada semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada pasca bencana.

Bencana yang telah terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi dampak-dampak kepada masyarakat, baik dalam hal material, kerusakan tempat tinggal, maupun dalam hal mental dan jiwa dari korban bencana.

Kemudian keadaan psikososial korban bencana tidak luput dari perhatian. TAGANA mendatangi untuk melihat keadaan korban, apakah mengalami stres ataupun sedih yang berkepanjangan akibat bencana yang telah terjadi. Kemudian TAGANA mendatangkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menangani keadaan psikososial korban.

Informan dari masyarakat mengatakan keadaan psikososialnya telah membaik dibandingkan pada saat bencana longsor yang terjadi di Trangkil, Gunung Pati. Namun yang penulis sayangkan adalah program psikososial ini tidak berkelanjutan. Yang mengakibatkan informan ini bisa sewaktu-waktu teringat akan kejadian tanah longsor tersebut yang telah meratakan rumahnya.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang pada pasca bencana belum dapat berjalan dengan baik.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

3.3.1 Faktor Pendukung

Berhasil atau tidaknya dalam suatu implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor pendukungnya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa

faktor pendukung pada implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang yang meliputi Kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana dan dukungan masyarakat.

3.3.1.1 Kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana

Kesesuaian tersebut merupakan kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh kebijakan dengan kemampuan organisasi pelaksana. Apabila organisasi pelaksana kebijakan tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh kebijakan, maka organisasi tidak dapat menyampaikan *output* kebijakan dengan tepat.

Kejelasan dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang menjadi fokus utama isi kebijakan yang mendukung. Penanggulangan bencana bidang sosial berbasis masyarakat yang diatur dalam Permensos tersebut membuat sudah adanya ketentuan untuk dijalankan.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti penentuan prioritas.

Kebijakan menjadi hal penting dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Adanya kebijakan

yang akan atau telah dibuat menjadikan semua warga negara harus taat terhadap aturan tersebut. Adanya kebijakan tentu akan mendorong pelaksanaan penanggulangan bencana yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Walaupun bencana datang tanpa diduga kapan, bagaimana, dan dimana terjadi, Kota Semarang dalam pelaksanaannya cukup memperhatikan permasalahan bencana seperti banjir maupun rob. Usaha yang dilakukan seperti aktif memberikan pembinaan kepada TAGANA oleh DINSOSPORA dan kegiatan lain sebagainya. Berikut hasil wawancaranya:

“Sebetulnya Semarang itu kalau kita lihat memang pemerintah cukup memperhatikan gimana mengatasi masalah bencana banjir atau rob. Tapi namanya bencana gak pernah berhenti, datang terus. Selama ini atau sampai saat ini kita baru mengadakan pembinaan seperti tadi terhadap TAGANA, memberi mereka fasilitas untuk pertemuan rutin untuk membahas apa aja yang mereka hadapi di lapangan, lalu kita evaluasi. Tahun berikutnya kita usahakan untuk menangani atau menanggulangi seperti contohnya biar rob tidak semakin merajalela. Lalu TAGANA kita bantu untuk penanaman mangrove, mangrove dari dinas pertanian kota. Lalu seperti pompa itu juga sudah dikasih pemerintah.”

(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

Hal serupa juga disampaikan oleh TAGANA sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana di Kota Semarang. Berikut hasil wawancaranya:

“Untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Semarang maupun Kepala Dinas DINSOSPORA sebagai pendukung. Alasannya dengan peran serta pemerintah membantu Kementerian Sosial dalam mensukseskan melancarkan kegiatan kebencanaan di lingkungan masyarakat.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Kamis, 1 September 2016)

Menurutnya, pelaksanaan dalam penanggulangan bencana tidak terlepas dari adanya suatu kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana.

Kebijakan ini adalah dalam rangka melancarkan kegiatan kebencanaan di Kota Semarang dengan peran serta dari unsur pemerintah, swasta, dan pemerintah.

Kebijakan TAGANA dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Semarang juga dapat dinilai melalui penilaian dari masyarakat, dimana masyarakat yang dimaksud adalah informan dalam penelitian ini. Hal ini menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak utama yang merasakan apakah Kota Semarang sudah layak atau belum dalam hal kebencanaan. Berikut hasil wawancaranya:

“Alhamdulillah sudah apa yang dibutuhkan oleh warga, seperti itu. Contohnya kayak bantuan pembangunan jalan.”
(Wawancara Sri Lestari. Hari Senin, 5 September 2016)

Berdasarkan hasil uraian wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong Implementasi Kebijakan Taruna Siaga Bencana dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Semarang yang pertama adalah Kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana. TAGANA dalam pelaksanaannya berlandaskan pada aturan-aturan yang telah ada dimana setiap bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan sesuai.

3.3.1.2 Dukungan Masyarakat

Upaya penanggulangan bencana pada saat ini telah mengalami paradigma maupun tindakan. Penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek dari bencana, namun juga sebagai pelaku dalam penanggulangan bencana.

Metode yang tepat dalam penanganan bencana saat ini adalah kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana di lingkungan masyarakat. Kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat diteraokan karena masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya-upaya penanganan dampak bencana dan pengurangan risiko bencana.

Peneliti menemukan bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan ini. Berikut hasil wawancaranya:

“Soalnya pada umumnya yang tinggal di wilayah yang masih rawan banjir dan masih rawan rob, justru mereka yang pendidikannya rendah rata-rata ya. Jadi kita memberi melalui pelatihan-pelatihan biar mereka lebih mudah mengerti di dalam bentuk praktek seperti dalam pembuatan tenda atau cara membuat dapur umum. Jadi kita tidak mendekati mereka dari ilmu pengetahuan saja, kita memberi contoh gimana caranya menolong anak umpamanya dan gimana caranya membuat perahu karet supaya jalan.”
(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

“Untuk masyarakat, sebagian besar sudah mendukung kepedulian kepada bencana terhadap lingkungannya masing-masing.”
(Wawancara Mukson Soni. Hari Kamis, 1 September 2016)

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus dapat dikatakan sebagai korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu

menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. masyarakat menjadi aktor utama dalam menjalankan roda kehidupan bencana. Dapat dikatakan bahwa dukungan masyarakat terhadap lingkungannya sudah baik sehingga hal ini dapat menjadi faktor pendukung dalam proses implementasi ini.

Berdasarkan hasil uraian wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan dari masyarakat merupakan faktor penting dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang. Pemerintahan yang baik tentu adalah pemerintahan yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat pada seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu dukungan dari masyarakat menjadi sangat penting dalam penanggulangan bencana.

3.3.2 Faktor Penghambat

Berhasil atau tidaknya dalam suatu implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor penghambatnya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa faktor penghambat pada implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial.

3.3.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam proses implementasi kebijakan. Adanya kejelasan tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada implementor dan masyarakat sehingga implementor dan masyarakat memahami pelaksanaan

kebijakan tersebut. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, maka kemungkinan kebijakan yang dibuat tidak akan efektif.

Masyarakat adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang. Jadi dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan jembatan bagi pemerintah terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang.

Untuk mengetahui mengenai proses penyampaian kebijakan yang dilakukan masyarakat, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau memang sudah ada bencana, itu biasanya serta-merta dari mulai asisten sampai kalau walikota kalau sudah merencanakan tuh asisten, sekda dan kepala dinas itu biasanya tidak melihat itu urusan siapa. Tapi kita mari kerjakan bersama, mari kita guyub gotong royong, apa yang bisa kita buat apa yang dinas lain juga buat, mungkin menyumbang sesuatu yang dibutuhkan oleh korban.”

(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

“Untuk komunikasi jika terjadi bencana nanti personil TAGANA terjun ke lapangan yang terkena musibah bencana kemudian kita menganalisa mendata berapa korban yang ada kerugian materi maupun jiwa kemudian kita laporkan kepada DINSOSPORA Kota Semarang maupun Dinsos Provinsi. Untuk komunikasi ke masyarakat dilakukan secara personal maupun dalam pelatihan. Kita mengadakan pelatihan di sekolah *Tagana Go To School* Ini sudah kita laksanakan pada 28 Februari 2015 di SMA 14 kemudian sosialisasi Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Mlatiharjo kemudian dilaksanakan lagi sosialisasi kebencanaan tanggap darurat bencana di 16 kecamatan.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Kamis, 1 September 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan cara yang tepat dalam proses penyampaian informasi terkait penanggulangan bencana melalui melakukan koordinasi dengan

pihak-pihak terkait. Selain itu melakukan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana.

Namun masih terdapat beberapa hal kendala terkait dengan penanggulangan bencana dalam melakukan tugas dan fungsinya dari pihak-pihak yang terlibat.

Berikut hasil wawancaranya:

“Ya memang sih dimana-mana gitu ya ada egonya, ini kan bukan punyaku ini kan sana atau katakanlah kadang saling melempar ya begitu BPBD, oh itu di Dinas Sosial, gak taunya kita disini sesuai tupoksi ternyata nggak di kita juga.”

(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

“Untuk koordinasi ini sejauh ini sudah baik. Ya masih ada satu-dua kendala yang kurang sedikit lah istilahnya laporan misalkan laporannya kurang lengkap atau data-data belum valid, itu hanya kecil kekurangannya.”

(Wawancara Mukson Soni. Hari Kamis, 1 September 2016)

Peneliti menemukan adanya kendalan dalam proses transformasi antar para pelaksana kebijakan terkait dengan koordinasi komunikasi sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal.

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses komunikasi antara pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat mengenai penanggulangan bencana ini telah menggunakan cara yang benar yaitu melalui sosialisasi dan penyuluhan, namun belum berjalan baik. Kemudian untuk komunikasi antar pelaksana kebijakan masih menemui kendala dikarenakan belum sempurnanya komunikasi koordinasi yang terjalin.

3.2.2.2 Sumber Daya Manusia

Meski kebijakan menjadi pendukung dalam proses implementasi, hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Manusia merupakan faktor terpenting dalam proses implementasi karena manusia memiliki kemampuan pemahaman dalam suatu kebijakan bahwa akan menghasilkan terlaksananya kebijakan penanggulangan bencana dengan baik.

Agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik maka memerlukan sumber daya manusia yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berikut hasil wawancaranya:

“Sebetulnya ini kan yang namanya anak muda sekarang ya, kalau kita lihat itu organisasi sosial itu kan sangat kurang. Jadi TAGANA yang ada sekarang itu mereka sudah mulai usia, katakanlah empat puluh keatas bahkan sudah ada yang lima puluh. Harapannya kan kita ada yang muda-muda yang mau juga, artinya bekerja sosial.”

(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil uraian wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi kualitas dalam pengimplementasian kebijakan pada aspek sumber daya manusia yaitu masih ditemukan kendala yaitu relawan-relawan TAGANA yang sudah berumur lanjut usia dan belum berjalannya regenerasi dengan baik. Kemudian dari segi kuantitas, jumlah yang aktif masih terbilang minim dengan jarak jangkauan bencana yaitu di Kota Semarang, sehingga belum tercapai secara maksimal.

3.3.2.3 Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan aspek dalam rangka mendukung proses implementasi dapat terus berjalan. Proses implementasi juga harus didukung dengan tersedianya anggaran. Hal yang tidak dapat dihindari dalam mendukung

pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah finansial. Setiap kegiatan tentu memerlukan anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, anggarannya masih terbilang minim apabila dikaitkan dengan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Berikut hasil wawancaranya:

“Memang kan anggarannya terbatas, sangat-sangat terbatas.”
(Wawancara Dra. Elis Simanjuntak. Hari Senin, 15 Agustus 2016)

“Untuk anggaran kegiatan, dari APBD Kota Semarang melalui DINSOSPORA Kota Semarang. Untuk anggaran secara keseluruhan masih ada kekurangannya. Kurang lebih 75% sudah mendukung 25% masih ada kekurangannya. Selama ini kita tutup dari swadaya dari relawan maupun sumbangan-sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.”
(Wawancara Mukson Soni. Hari Kamis, 1 September 2016)

Dalam penanggulangan yang ditangani oleh DINSOSPORA maupun TAGANA, anggarannya terbatas. Anggaran yang terbatas tersebut membuat pelaksanaan penanggulangan bencana tidak berjalan maksimal. Dalam kondisi seperti ini dapat diketahui bahwa kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang ada belum mencukupi. Adanya keterbatasan anggaran membuat dalam melaksanakan kebijakan ini belum maksimal terutama dalam mengadakan kegiatan-kegiatan seputar kebencanaan.